

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah cabang penting dari Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ruang lingkup hubungan internasional adalah hubungan kompleks yang ada di antara negara-negara berdaulat di dunia. Hal ini terutama berkaitan, antara lain, dengan studi mendalam tentang semua peristiwa dan situasi yang mempengaruhi lebih dari satu keadaan. Filsuf besar Yunani Aristoteles, mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Sifat dan kebutuhan dasar membuatnya memenuhi berbagai kebutuhan dalam pergaulan dan pola interaksi dengan orang lain.

Selain itu, tidak ada manusia yang mencukupi dirinya sendiri bahkan dalam kebutuhan sehari-harinya, Oleh karena itu, manusia harus bergantung pada sesamanya untuk kelangsungan hidupnya (Schleicher, 1954).

Sama seperti individu yang tidak dapat hidup dalam isolasi, begitu pula negara juga tidak mampu hidup dalam isolasi. Seperti individu, tidak ada negara yang mandiri. Secara alami, sebuah negara harus memupuk hubungan antar negara. Hubungan-hubungan ini adalah pokok bahasan Hubungan Internasional. Hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai kegiatan sosial politik dan jenis aspek interaksi lainnya di antara dua negara atau lebih. Bidang akademik hubungan internasional adalah cabang ilmu sosial dan politik yang mempelajari hubungan antar negara, kebijakan luar negeri

negara bangsa, dan mekanisme institusi (seperti organisasi internasional, organisasi antar pemerintah internasional dan nasional, organisasi non pemerintah dan perusahaan multinasional) di mana negara berinteraksi. Studi hubungan internasional melibatkan banyak mata pelajaran seperti perdamaian, keamanan internasional dan regional, organisasi internasional, proliferasi nuklir, globalisasi, hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, intervensi, hubungan keuangan internasional, dan hubungan perdagangan internasional.

Sejak awal, hubungan internasional telah didefinisikan dalam banyak cara. Seperti yang dikatakan Stanley Hoifmann,

Bagaimana seseorang bisa setuju sekali tentang definisi bidang yang ruang lingkungannya selalu berubah-ubah? Memang, bidang yang fluktuasinya berubah merupakan salah satu karakteristik utamanya (Hoifmann, 1964).

Dengan demikian, hubungan internasional tidak dapat didefinisikan dengan cara yang dapat diterima secara umum. Prof. Charles Schleicher mendefinisikan hubungan internasional sebagai hubungan antar negara.

Quincy Wright mendefinisikan hubungan internasional sebagai hubungan antara kelompok-kelompok yang sangat penting dalam kehidupan dunia pada setiap periode sejarah.

Menurut Prof. Hans Morgenthau, hubungan internasional adalah perebutan kekuasaan antar bangsa. Norman Podelford dan George Lincoln mendefinisikan hubungan internasional sebagai interaksi politik negara dengan pola hubungan kekuasaan

yang berubah. Padelford dan Lincoln mendefinisikannya sebagai interaksi kebijakan negara dalam pola hubungan kekuasaan yang berubah.

Namun, definisi umum yang dapat merangkum semua definisi dari hubungan internasional diberikan oleh Harold dan Margaret Sprout. Mereka mendefinisikan

Hubungan internasional sebagai aspek-aspek interaksi dan hubungan komunitas politik independen di mana beberapa elemen oposisi, perlawanan atau konflik tujuan atau kepentingan hadir (Sprout, 1963).

Sedangkan menurut Hartman,

Hubungan Internasional sebagai bidang studi difokuskan pada proses dimana negara menyesuaikan kepentingan nasional mereka dengan kepentingan negara lain.

Palmer dan Perkins berpendapat bahwa politik Internasional pada dasarnya berkaitan dengan sistem negara. Sprout juga mendefinisikan hubungan internasional sebagai aspek interaksi dan hubungan komunitas politik independen di mana beberapa elemen oposisi, perlawanan dan konflik Pandangan Tradisional menjadi cakupannya. Hubungan Internasional ini adalah pandangan yang didominasi banyak negara. Definisi di bawah kategori ini memberikan penekanan pada studi politik dan hubungan di antara negara-negara bangsa. Hal ini menganggap negara bangsa sebagai aktor utama politik internasional dan berfokus pada hubungan sosial dan politik. Dengan kata lain, ini adalah definisi politik internasional dan bukan hubungan internasional. Dari tahun-tahun awal 1950an, hubungan internasional dikenal dan dipelajari sebagai inter politik nasional.

Sejak Perang Dunia I dan terutama setelah Perang Dunia II, berbagai sarjana, universitas, organisasi akademik, dan institusi berusaha untuk mengukir bidang studi khusus untuk hubungan internasional. Beberapa dari mereka telah mengajukan daftar

terbatas dan daftar isi lengkap lainnya. Hal ini menimbulkan kontroversi luas di kalangan peneliti.

2.1.2 Diplomasi

Diplomasi merupakan metode untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah dan masyarakat sebuah negara melalui dialog, negosiasi, dan tindakan lain selain perang atau kekerasan. Praktek diplomasi modern adalah produk dari Renaissance yang merupakan sistem negara Eropa. Secara historis, diplomasi berarti pelaksanaan hubungan resmi (biasanya bilateral) antara negara berdaulat. Namun, pada abad ke-20, praktek diplomatik yang dirintis di Eropa telah diadopsi di seluruh dunia, dan diplomasi telah meluas hingga mencakup pertemuan puncak dan konferensi internasional lainnya, diplomasi parlementer, aktivitas internasional entitas supranasional dan sub-nasional, diplomasi tidak resmi oleh elemen non pemerintah, dan pekerjaan pegawai negeri sipil internasional. Istilah diplomasi berasal dari bahasa Yunani kuno *diplōma*, terdiri dari *diplo*, yang berarti "lipatan" dan akhiran *-ma*, yang berarti "sebuah objek." Diplomasi kemudian diidentikkan dengan hubungan internasional. Pada abad ke-18 istilah Prancis *diplomate* ("diplomat" atau "diplomatis") datang untuk merujuk pada orang yang berwenang untuk bernegosiasi atas nama negara.

Diplomasi adalah kategori praktek dan kategori analisis. Ini adalah label yang digunakan para praktisi untuk menggambarkan serangkaian cara yang terorganisir secara sosial dan bermakna dalam melakukan sesuatu di panggung internasional. Praktek diplomatik, dengan kata lain, mewujudkan bentuk-bentuk pengetahuan dan kompetensi yang bermakna secara sosial dan dapat dikenali pada tingkat tindakan. Diplomasi juga

dapat dipahami sebagai kategori analisis, yaitu, sebagai blok bangunan konseptual dari sistem teoritis.

Untuk mencapai tingkat itu, diplomat perlu menaiki apa yang disebut 'tangga abstraksi' dan melepaskan konsep elemen kontekstualnya yang mendalam. (E. Abdulrahmanli, 2021).

Berdasarkan Sending, Pouliot dan Neumann,

Diplomasi didefinisikan sebagai klaim untuk mewakili pemerintahan tertentu kepada dunia luar. Sebagai kategori analisis, konsep diplomasi kemudian bermuara pada tiga komponen utama, pertama, diplomasi adalah sebuah proses (mengklaim otoritas dan yurisdiksi); kedua, bersifat relasional (beroperasi antarmuka antara pemerintahan seseorang dan orang lain); dan ketiga, bersifat politis (melibatkan perwakilan pemerintahan) (OJ Sending, 2015).

Definisi diplomasi tradisional menekankan pada agen pemerintah. Mengamati sifat diplomasi yang berubah, para sarjana secara progresif memperluas definisi ini untuk memasukkan tidak hanya interaksi antara agen resmi, tetapi juga antara perwakilan negara dan non-negara – yang disebut Wiseman sebagai 'polilateralisme' (2004).

Selain itu, penstudi diplomasi telah mengalihkan perhatiannya ke kegiatan non-tradisional (diplomasi publik, diplomasi LSM, diplomasi digital, diplomasi ekonomi dan sebagainya). Dengan memperluas cakupan studi diplomatik, kumpulan literatur ini memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi studi tata kelola global (AF Cooper, 2008).

Melissen, menyebut fokus inovatif ini pada berbagai kegiatan yang terlibat dalam diplomasi sebagai perspektif 'relasionalis' tentang politik dunia. Alih-alih melihat karakteristik internal aktor internasional, tujuan mereka atau konteks interaksi mereka, Melissen berpendapat, orang harus fokus pada interaksi atau hubungan itu sendiri. (Melissen, 2011) Penstudi yang berbeda mempelajari berbagai jenis interaksi. Beberapa

menganggap negosiasi sebagai kegiatan dasar diplomasi, sementara yang lain menekankan pada komunikasi (C Bjola, 2013).

Lambang dari perspektif relasional adalah penokohan Sharp dimana diplomasi sebagai hubungan antar kelompok yang ingin mempertahankan kondisi 'keterpisahan'.

Dengan kata lain, diplomasi merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang berbeda karena kelompok-kelompok politik yang masuk dalam hubungan tersebut mengklaim keberadaan yang berbeda satu sama lain (Sharp, 2009).

Di luar studi diplomatik itu sendiri, sejumlah teori hubungan internasional membantu dalam memahami bagaimana aspek-aspek kunci politik dunia muncul dari proses sosial bottom-up yang terkait dengan diplomasi. Realis klasik seperti Morgenthau dan Kissinger, misalnya, sangat memahami pentingnya praktek diplomatik dalam pelaksanaan politik internasional. Lebih dekat ke masa sekarang, konstruktivis juga telah menerangi berbagai proses sosial di panggung dunia, termasuk sosialisasi, pengaruh sosial, jebakan retorik, dan budaya organisasi. Berbagai teori hadir sebagai penekanan tentang pentingnya aktor yang bermain di dunia internasional. Sejumlah karya baru-baru ini juga telah membantu menjelaskan politik dunia dengan melihat berbagai praktek internasional yang terkait dengan diplomasi.

Diplomasi memiliki ruang lingkup baru setelah Globalisasi. Istilah globalisasi diambil dari bahasa Inggris dan digunakan dalam pengertian menghilangkan batas-batas baik dari bidang ekonomi, sosial, politik, dan aspek lainnya. Sebagai akibat dari globalisasi, diplomasi telah dibedakan dalam berbagai bidang sesuai dengan karakteristik tertentu. Jenis-jenis diplomasi seperti Diplomasi Mediasi; Diplomasi Multilateral;

Diplomasi Ganda; Diplomasi Sipil; Diplomasi Puncak; Diplomasi Konferensi; Diplomasi Parlemen; Diplomasi Sosial; Diplomasi Nuklir; Diplomasi Budaya; Diplomasi Lingkungan; Diplomasi Kemanusiaan; Diplomasi Terbuka; Diplomasi Koersif; *Hard Diplomacy*; *Soft Power Diplomacy*; *Cross Diplomacy*; dan Diplomasi Publik telah melengkapi setiap praktek dalam tatanan kerja sama dunia internasional.

2.1.3 Diplomasi Budaya

Budaya memiliki definisi yang luas. Baik institusi budaya dan seni rupa dan budaya yang ada ada di dalam, dan berinteraksi dengan, konteks budaya populer yang lebih luas. Budaya memiliki kemampuan menjangkau sejumlah besar orang, menjadikannya media ideal untuk diplomasi publik (Bound, Briggs, Holden and Jones, 2007: 28). Pertukaran budaya sekarang sangat cepat dan mampu memberikan efek mendalam, baik secara lateral maupun ke atas, sejauh ini diplomasi budaya secara langsung mempengaruhi dan bahkan dapat mengarahkan bentuk diplomasi publik yang lebih tradisional.

Diplomasi budaya adalah promosi ke luar negeri dari pencapaian budaya negara, penekanan khusus sering diberikan pada bahasa dan seni tetapi juga mencakup sains dan teknologi (Berridge and Lloyd, 2012: 87).

Berdasarkan definisi tersebut diplomasi budaya merupakan promosi budaya seperti bahasa, seni, sains dan teknologi sebuah negara ke negara lain. Karena penekanannya beralih dari mendengarkan dan semakin mengarah pada promosi perspektif tertentu, diplomasi budaya adalah tindakan menghadirkan sebuah budaya yang baik kepada audiens dalam usaha untuk melibatkan mereka dalam sebuah gagasan. Gagasan klasik tentang diplomasi budaya memerlukan penggunaan budaya sebagai

komponen diplomasi, dan ini sebagian besar terbatas pada promosi budaya satu negara di luar negeri untuk memperkuat hubungan dengan negara lain, untuk meningkatkan kerja sama atau untuk mempromosikan kepentingan nasional. Gagasan ini semakin berkembang, ditantang oleh keterkaitan global yang terus meningkat sehingga teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat memfasilitasi dan pergeseran pertukaran budaya yang terjadi dari masyarakat ke ranah privat.

Diplomasi yang merupakan media atau alat, digunakan oleh negara, perwakilan resmi dan lain-lain dalam menjalin hubungan diplomatik, dalam melaksanakan diplomasi, terdapat dua cara yaitu menggunakan soft power diplomacy dan hard power diplomacy. Hadirnya soft power diplomacy merupakan salahsatu bukti dari ke-dinamisan ilmu hubungan internasional. Pada era modern, berdiplomasi menggunakan soft power diplomacy merupakan suatu hal yang dianjurkan. Diplomasi dengan cara konvensional sudah banyak ditinggalkan karena dinilai kurang efektif. (Faiza, N. N., dkk., 2020)

Diplomasi merupakan salah satu alat yang digunakan bagi negara dalam melaksanakan politik luar negerinya dan mencapai kepentingan nasional yang bisa menjadi nilai tawar bagi sebuah negara sehingga dapat membangun citra dari negara tersebut dan diplomasi masuk sebagai kajian dalam Hubungan Internasional karena pengaruhnya dapat memberikan dampak besar bagi sebuah negara. Dengan adanya diplomasi, sebuah negara dapat mencapai tujuannya dengan melakukan proses negosiasi dengan negara lain tanpa melakukan kekerasan.

Kebudayaan mengandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, nilai moral dan sosial, hukum, adat istiadat, kemampuan lain serta kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai bagian dari kelompok masyarakat sesuai asal dari manusia tersebut. Dengan melakukan komunikasi lintas budaya diharapkan dapat mendorong kesadaran

diri, memberikan penghargaan, dan toleransi akan perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat yang multikultural. Diplomasi budaya adalah kegiatan diplomasi yang menggunakan pertukaran ide, nilai, tradisi, serta aspek budaya dan identitas lainnya yang bertujuan dalam memperkuat sebuah hubungan antar negara, meningkatkan kerja sama sosial-budaya, dan mempromosikan kepentingan nasional, selain itu model diplomasi ini termasuk dalam *soft power*. Diplomasi budaya tidak hanya dilakukan oleh negara saja, akan tetapi juga bisa digunakan oleh aktor non-negara seperti NGO, *Multi National Corporation*, ataupun aktor individu. Diplomasi budaya sudah banyak digunakan oleh banyak negara. Karena dengan menggunakan diplomasi budaya ini dapat menarik lebih banyak perhatian dari masyarakat luar. Oleh karena itu, diplomasi budaya dapat menjadi strategi bagi sebuah negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya, terlebih jika produk budaya yang mereka keluarkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luar.

Diplomasi budaya menjadi upaya dari aktor internasional dalam mengenalkan budayanya agar dikenal di negara lain. Pada masa globalisasi ini, kemajuan teknologi dan informasi membuat masyarakat dari berbagai dunia dapat mengakses segala informasi yang ingin mereka cari dan hal ini menguntungkan bagi diplomasi budaya, dan ditambah jika budaya tersebut memiliki persamaan dengan masyarakat luar, maka budaya dapat menarik perhatian lebih dari masyarakat tersebut. Adapun media yang biasa digunakan dalam penyebaran budaya suatu negara melalui Televisi, *Youtube*, *Instagram*, *Twitter* dan sebagainya.

Diplomasi budaya dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk pengukuhan identitas diri dari suatu negara, atau lebih dikenal sebagai *nation branding*. *Nation*

branding adalah konsep yang relatif baru yang merupakan proses penerapan teknik *branding* negara melalui Lembaga pemerintahan, instansi perusahaan nasional, individu, dan lain sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membangun dan mengelola reputasi suatu negara. *Nation branding* dipraktekkan oleh banyak negara termasuk Malaysia. Ada minat yang tumbuh di antara negara-negara yang kurang makmur untuk mempraktekkan *branding* bangsa karena memiliki kapasitas untuk meningkatkan citra mereka di luar negeri dan mempromosikan perdagangan, pariwisata, dan investasi langsung. Demikian pula, *nation branding* jika dilakukan dengan tepat berpotensi melawan *stereotype* yang diasosiasikan dengan negara tertentu. Simon Anholt memperhatikan pentingnya dampak dari *nation branding* dan menyatakan negara telah menjadi jauh lebih sadar akan nilai merek mereka sebagai suatu aset. Anholt adalah konseptualis di balik metode untuk mengevaluasi seberapa efektif *branding* suatu negara. Indeks merek suatu negara diperoleh dari rata-rata skor untuk beragam kriteria yang meliputi masyarakat, tata kelola, ekspor, pariwisata, budaya dan warisan, serta investasi dan imigrasi.

Memahami nilai merek nasional membantu negara mengaitkan investasi yang mereka lakukan dengan lebih baik di bidang yang memengaruhi citra global mereka. Dengan demikian, upaya *branding* telah melangkah ke era baru dan *branding* bangsa sebagai sebuah konsep telah menjadi sangat populer. Pemerintah kontemporer telah mulai mempekerjakan firma hubungan masyarakat untuk membantu mereka meluncurkan kampanye *branding* canggih yang bertuju menarik investasi asing, mendorong perdagangan, dan bahkan meningkatkan pengaruh geopolitik secara keseluruhan.

Seperti yang diungkap oleh Goff (2013), mengutip perkataan dari Milton Cummings, yang berpendapat bahwa

Diplomasi budaya adalah pertukaran gagasan, informasi, seni dan aspek budaya lainnya di antara bangsa-bangsa dan masyarakat mereka untuk mendorong mutual understanding.

Selanjutnya, Goff (2013), mengutip perkataan Laqueur yang mencirikan diplomasi budaya sebagai penggunaan ekspresi kreatif dan pertukaran gagasan, informasi, dan orang untuk meningkatkan mutual understanding. Berdasarkan kedua definisi tersebut, diplomasi budaya adalah upaya untuk mencapai kepentingan negara dalam memahami, menginformasikan dan mempengaruhi serta membangun citra negara lain melalui budaya. Melalui budaya ditemukan titik-titik kesamaan dan perbedaan, dan sarana untuk saling memahami satu sama lain.

Pameran, pertunjukan dan bentuk budaya lainnya memungkinkan keterlibatan dengan warisan dan budaya kehidupan orang lain (Bound, Briggs, Holden and Jones, 2007: 26) Diplomasi budaya dilakukan untuk meningkatkan citra positif, membangun mutual understanding dan memperbaiki citra bangsa. Goff (2013), mengatakan diplomasi budaya muncul dari dua tempat. Pertama, hubungan baik bisa berakar pada dasar pemahaman dan rasa hormat. Kedua, diplomasi budaya bersandar pada asumsi bahwa seni, bahasa, dan pendidikan termasuk di antara titik masuk paling signifikan dalam budaya.

Diplomasi budaya berada pada spektrum pendekatan ideal untuk diplomasi, karena pada spektrum ini seseorang dapat menemukan soft power, branding, propaganda, dan diplomasi publik (Goff, 2013).

Diplomasi budaya adalah yang pertama dan terutama tentang menjembatani perbedaan dan memfasilitasi *mutual understanding*.

Aktor pemerintah menggunakan diplomasi budaya, NGO melakukan kegiatan amal, peran budaya dan lingkungan, dan pihak lain membuat koneksi di seluruh dunia sering menggunakan relasi atau soft power untuk membangun hubungan dan pemahaman (Wrigley, 2015).

Berdasarkan pengertian tersebut diplomasi budaya dapat dilakukan oleh *state* dan *non state actor* dalam membangun hubungan dengan sebuah negara dan *mutual understanding*. Diplomasi budaya dapat merujuk pada institusi dan kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan gagasan dan nilai tertentu; ini mungkin menandakan bagaimana negara (atau entitas transnasional lainnya) mencoba mempengaruhi aktor lain. (Umińska and Woroniecka, 2016: 4) Akhirnya, hal itu bisa menggambarkan proses komunikasi antar pelaku hubungan internasional. Menurut Nye (dalam Carbone, 2017),

diplomasi budaya didefinisikan dalam konteks hubungan internasional sebagai keterampilan untuk membujuk melalui budaya, nilai-nilai dan gagasan daripada melalui sarana militer.

Selanjutnya, Cummings (dalam Carbone, 2017) menyebutkan bahwa,

diplomasi budaya merepresentasikan pertukaran ide, informasi, seni, dan aspek budaya lainnya di antara bangsa-bangsa dan orang-orangnya untuk menumbuhkan mutual understanding.

Diplomasi Kebudayaan berkembang secara pemahaman sejalan dengan perkembangan pembahasan mengenai diskusi *soft diplomacy* pada konteks hubungan antar negara tidak terlepas dari konsep *soft power*, *hard power* dan *smart power* yang dikemukakan oleh Nye pada praktek *American power* yang kemudian berkembang di

berbagai negara di kawasan Asia dan Eropa. Kuatnya dorongan untuk lebih mengoptimalkan upaya-upaya diplomasi sebagai konsekuensi dari tingginya biaya perang ditambah dengan globalisasi serta perkembangan teknologi menjadi pemicu bergesernya upaya penggunaan *hard power* dalam penyelesaian konflik internasional. Dalam konteks ini, diplomasi kebudayaan menjadi alat bagi negara-negara saat ini untuk mendapat posisi di mata internasional. Sering kali diplomasi budaya tidak dilakukan dalam mekanisme pemerintah ke pemerintah, melainkan ditekankan pada hubungan pemerintah ke masyarakat dan yang paling penting adalah hubungan masyarakat ke masyarakat.

Menurut Gienow-Hecht and Donfried (dalam Carbone, 2017), terdapat empat komponen karakteristik utama dari diplomasi budaya; 1) *the agent*; 2) *an agenda*; 3) *a vehicle* dan 4) *a target audience*.

Komponen pertama dalam kegiatan diplomasi budaya adalah aktor (*agent*). Aktor diplomasi budaya dapat berupa organisasi pemerintah dan juga non pemerintah, atau masih merupakan perusahaan atau organisasi nirlaba. Dalam hal ini aktor diplomasi budaya dapat diwakili oleh beberapa lembaga yang berbeda sifat dan digabungkan bersama.

Saat ini, gagasan diplomasi budaya yang sepenuhnya tergantung pada pemerintah telah dilampaui: kemitraan antara sektor publik dan swasta, bekerja sama dengan masyarakat sipil, adalah dasar bagi praktek diplomasi budaya kontemporer (Carbone, 2017).

Komponen kedua adalah agenda. Agenda aktor diplomasi budaya mewakili misi, tujuan dari kepentingannya. Pengungkapan nilai-nilai dan ekspresi budaya suatu negara

dan promosi dialog antar budaya mewakili misi aktor diplomasi budaya, secara umum. Aktor harus merefleksikan tentang cara terbaik untuk mengejar tujuannya (Carbone, 2017).

Komponen ketiga adalah *vehicle*. Melalui sarana apa aktor mentransmisikan ekspresi budaya atau nilai-nilai suatu bangsa merupakan '*vehicle*' diplomasi budaya. Ekspresi budaya, terutama yang artistik, adalah sarana diplomasi budaya yang kuat, di mana banyak pemerintah secara signifikan berinvestasi, baik langsung maupun tidak langsung. Film, olahraga, serta pertukaran akademik dapat dianggap sebagai *vehicle* diplomasi budaya (Carbone, 2017).

Target *audience* adalah komponen keempat. Definisi komponen keempat dari aktivitas diplomasi budaya tidak selalu merupakan tugas yang mudah. Inisiatif yang dilakukan dalam diplomasi budaya biasanya diarahkan ke seluruh bagian masyarakat sipil atau elit tertentu yang ditargetkan seperti akademisi, wartawan dan politisi. Hal ini disebabkan karena tergantung pada banyak faktor, bahkan karena beberapa kategori dapat mewakili target *audience*. Target *audience* harus konsisten dengan pernyataan misi dan sesuai dengan serangkaian tujuan (Carbone, 2017).

2.1.4 Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional (MNC), juga disebut perusahaan transnasional, setiap perusahaan yang terdaftar dan beroperasi di lebih dari satu negara pada suatu waktu. Umumnya korporasi memiliki kantor pusat di satu negara dan mengoperasikan anak

perusahaan yang dimiliki seluruhnya atau sebagian di negara lain. Anak perusahaannya melapor ke kantor pusat perusahaan.

Dalam istilah ekonomi, keuntungan perusahaan dalam mendirikan perusahaan multinasional mencakup skala ekonomi (yaitu, pengurangan biaya yang dihasilkan dari tingkat *output* yang diperluas dan konsolidasi manajemen) dan peningkatan pangsa pasar.

Meskipun hambatan budaya dapat menciptakan hambatan yang tidak dapat diprediksi karena perusahaan mendirikan kantor dan pabrik produksi di seluruh dunia, keahlian teknis perusahaan, personel yang berpengalaman, dan strategi yang terbukti biasanya dapat ditransfer dari satu negara ke negara lain. Kritik terhadap perusahaan multinasional biasanya memandangnya sebagai sarana ekonomi dan, sering kali, politik dari dominasi asing. Negara-negara berkembang, dengan kisaran ekspor yang sempit (sering kali barang-barang primer) sebagai basis ekonominya, sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Praktek monopoli, pelanggaran hak asasi manusia, dan gangguan terhadap sarana pertumbuhan ekonomi adalah beberapa risiko yang dihadapi negara tuan rumah.

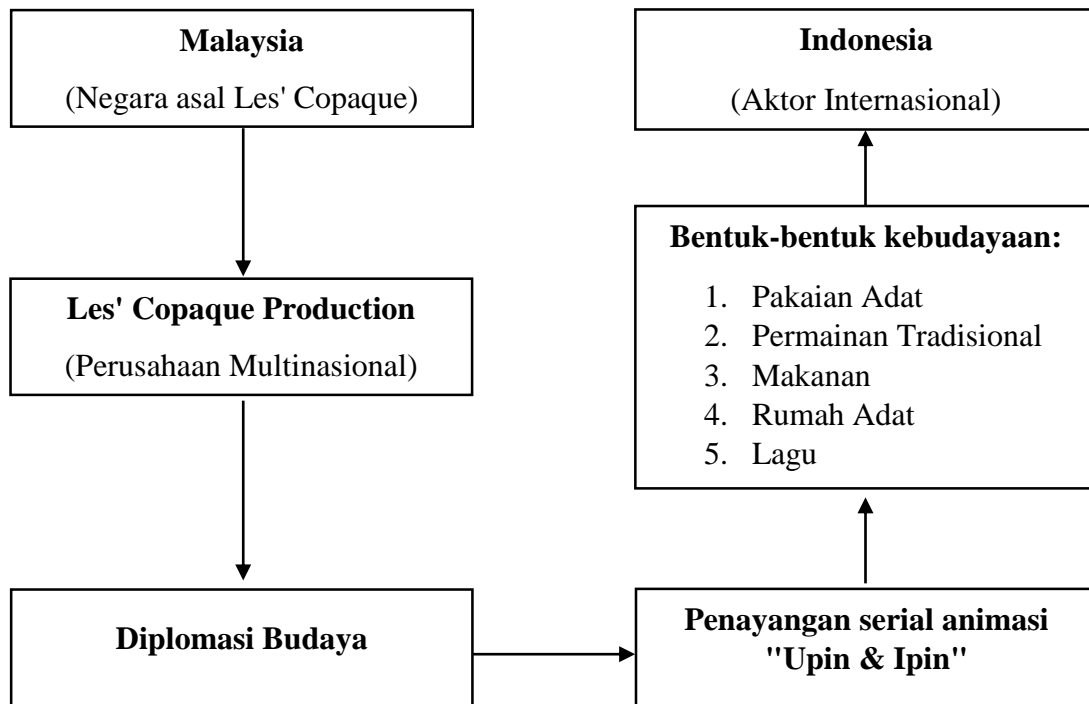
2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Definisi dipaparkan dari buku berjudul Metode Penelitian Kuantitatif karya Dominikus Dolet Unaradjan. Dalam definisi ini, kerangka pemikiran dibuat lebih spesifik untuk karya tulis penelitian ilmiah. Kerangka pemikiran memuat semua variabel penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka pemikiran kemudian penjelasannya dapat digambarkan dalam bentuk susunan bagan yang saling terhubung, atau bagan alir. Sehingga, kerangka pemikiran diartikan juga sebagai suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.

Kerangka pemikiran pada dasarnya adalah susunan seluruh variabel atau segala sesuatu yang nantinya membantu memberikan alur penjelasan yang baik dan benar dari sebuah penelitian. Sedangkan dalam karya tulis umum, seperti tulisan non ilmiah, Kerangka pemikiran di dalamnya terdapat seluruh permasalahan yang akan diceritakan di dalam karya tulis yang dibuat. Mulai dari pengenalan, lalu penyebab konflik, kemudian proses menyelesaikan konflik, dan bagian *ending* atau penutup. Semua dicantumkan di dalam kerangka pemikiran.

Pada penelitian saat ini, kerangka pemikiran memiliki konstruksi penjelasan dimana Malaysia menggunakan serial animasi "Upin & Ipin" dalam melakukan diplomasi budayanya untuk mencapai kepentingan nasional negaranya terutama di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari cari Malaysia memperbaiki citra negara mereka di publik Indonesia guna pemenuhan kepentingan nasional Malaysia. Jika digambarkan akan muncul susunan bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data olahan pribadi